

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tercukupinya dokumen perencanaan Dispeliterkan		Jumlah dokumen perencanaan yang tidak terdokumentasikan	keterbatasan/kesulitan dalam penyediaan data	C	kurang terpenuhinya pemenuhan data untuk penyusunan dokumen perencanaan	Koordinasi bidang dan UPT, Koordinasi dengan pihak ketga/perguruan tinggi (Masterplan)	2	2	4	rendah		Dispeterikan/cq Sekretariat	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tercukupinya laporan kinerja perangkat daerah		terjadi keterlambatan pelaporan	aplikasi SIMONEVA sering error	C	sanksi penilaian kinerja dari adminbangda	memedomani timeschedule pelaporan keuangan	2	2	4	rendah	lebih intensif dim koordinasi dgn pihak terkait	Dispeterikan/cq Sekretariat	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tercukupinya jumlah bulan pembayaran gaji ASN		terjadi keterlambatan pembayaran gaji ASN	keterbatasan jml personil	C	kurang terpenuhinya pembayaran Gaji ASN	memaksimalkan personil yg ada	2	2	4	sangat rendah	usulan permintaan personil akuntansi	Dispeterikan/cq Sekretariat	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tercukupinya kegiatan yang dikelola		laporan-laporan kurang teradministrasi dgn baik	keterbatasan jml personil	C	penyerahan laporan kadang terlambat	memaksimalkan personil yg ada	2	2	4	sangat rendah	usulan permintaan personil akuntansi	Dispeterikan/cq Sekretariat	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	tercukupinya laporan keuangan akhir tahun		laporan-laporan kurang teradministrasi dgn baik	keterbatasan jml personil	C	penyerahan laporan kadang terlambat	memaksimalkan personil yg ada	2	2	4	sangat rendah	usulan permintaan personil akuntansi	Dispeterikan/cq Sekretariat	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		koordinasi dan konsultasi tidak terlaksana	terlalu banyak kegiatan di masing-masing	C	keterbatasan informasi yg diperoleh oleh skpd	membuat timeschedule rapat2. dan anggaran kas	2	2	4	sangat rendah	SOP penyelenggaraan rapat koordinasi dan SOP penyelenggaraan perjalanan dinas dalam daerah	Dispeterikan/cq Sekretariat	
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan gedung kantor selama 12 bulan		peralatan kantor tidak tersedia	harga dan spek barang tdk sesuai rencana /	UC	kinerja dan pelaksanaan kegiatan terhambat	membuat RKBu, survey harga dan spek barang	2	2	4	sangat rendah	SOP pengadaan perafatan	Dispeterikan/cq Sekretariat	
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tercapainya pengelolaan surat menyurat		kelancaran tugas kedinasan terhambat	surat kurang dorespon dgn cepat oleh	C	menurunnya pelayanan dalam surat menyurat	SOP surat masuk dan SOP surat keluar	2	2	4	sangat rendah	kebijakan pimpinan utk menertibkan alur surat (SOP surat) dan koordinasi masing2 bidang/ bagian	Dispeterikan/cq Sekretariat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		rekewning tdk terbayar	terjadi lonjakan pemakaian, kesalahan	C	dana tidak mencukupi	lapor ke pihak terkait (PDAM, PLN)	2	2	4	rendah	koordinasi ke pihak terkait	Dispeterikan/cq Sekretariat	
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan		keterlambatan penggantian suku cadang dan perpanjangan STNK	kurangnya kesadaran pemegang kendaraan	C	penyerapan anggaran tdk maksimal	pedoman/jadwal pemeliharaan kendaraan, mengefektikan anggaran yang tersedia	2	2	4	sangat rendah	SOP pemeliharaan kendaraan	Dispeterikan/cq Sekretariat	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan kantor selama 12 bulan		sarana prasarana kantor tidak terpelihara	pengguna peralatan tidak melaporkan	C	menurunnya kinerja karyawan	pendataan dan pelaporan kerusakan sarpras, mengefektikan anggaran	2	2	4	sangat rendah	SOP pemeliharaan peralatan	Dispeterikan/cq Sekretariat	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan	gedung kantor tidak terpelihara	pengguna gedung tidak melaporkan adanya kerusakan,	C	kerusakan gedung	permohonan pemeliharaan di masing2 bagian dan jadwal pemeliharaan gedung, mengefektifkan anggaran yang tersedia	2	2	4	rendah	SOP pemeliharaan gedung	Dispeterikan/cq Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya perlengkapan kantor selama 12 bulan	sarana prasarana kantor tidak terpelihara	pengguna peralatan tidak melaporkan adanya kerusakan, kurangnya pemantauan/kont	C	menurunnya kinerja karyawan	pendataan dan pelaporan kerusakan sarpras, mengefektifkan anggaran yang tersedia	2	2	4	sangat rendah	SOP pemeliharaan perlengkapan	Dispeterikan/cq Sekretariat
7.	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil												
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembayaran, Kemitraan Usaha		penerima bantuan kurang bisa mengembangkan budidaya	petani belum bermental budidaya, dan iklim	C dan UC	penerima bantuan kurang bisa mengembangkan bantuan	Membekali petani dgn ilmu dan melaksanakan movev, pemberian bantuan obat	2	3	6	rendah	Kebijakan pemberian bantuan benih ikan	Dispeterikan/cq Bid. Budidaya Perikanan
8.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan												
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya target capaian produksi benih ikan	menurunnya kualitas induk ikan	induk sudah lama dan tua	C	kualitas budidaya perikanan menurun	memberikan bantuan induk ikan dan bintek	2	2	4	sangat rendah	pemberian bantuan pelet, dan bintek produksi pakan mandiri	Dispeterikan/cq Bid. Budidaya Perikanan
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	mendukung Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan sehingga tercapai petani ikan yang langguh dan sejahtera	apabila kegiatan ini dilakukan alau tidak berjalan dengan baik, kejadian kasus penyakit ikan dapat meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.	keterbatasan dana dan sarana, masih kurangnya perhatian	UC / C	penyebaran penyakit ikan yang meluas terjadi kematian yang tinggi, sehingga menurunkan pendapatan petani, terjadi orang miskin	menginformasikan terjadinya kasus dengan surat himbauan, leaflet bimbingan pengendalian penyakit dan materi	3	3	9	moderat	membuat jadwal monitoring secara berkala, berupa pengambilan sampel, pengujian sampel, identifikasi penyakit, pengukuran kualitas air budidaya, sehingga apabila ada	Dispeterikan/cq Bid. Budidaya Perikanan
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	inat RPJMD	kesalahan penentuan calon penerima bantuan	terlalu banyak usulan/ proposal yg masuk	UC	menurunnya hasil produksi perikanan	Identifikasi kelompok, pembekalan/ bintek sbilm pelaksanaan kegiatan, movev	2	3	6	rendah	membuat database kelompok.	Dispeterikan/cq Bid. Budidaya Perikanan
9.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil												
	Penyediaan Data Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya produksi ikan konsumsi	Belum maksimalnya jaringan pemasaran/promosi perikanan pelaku usaha perikanan	kurangnya informasi ttg sesama pelaku usaha	C	menurunnya produksi dan omzet pemasaran hasil perikanan	sosialisasi dan menyebarkan informasi usaha perikanan di medsos	3	2	6	sangat rendah	menghidupkan cluster perikanan	Dispeterikan/cq Bid. Budidaya Perikanan
10.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota												
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya target angka konsumsi ikan dan sasaran gemarikan	Belum tercapainya target Angka Konsumsi Ikan	kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai gizi ikan	UC	kondisi kesehatan masyarakat menurun	sosialisasi ke sekolah, posyandu, dan membagikan paket makan ikan dan kaos olahraga	2	2	4	sangat rendah	mengadakan pasar ikan murah	Dispeterikan/cq Bid. Budidaya Perikanan
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya produksi ikan konsumsi	Belum maksimalnya jaringan pemasaran/promosi perikanan pelaku usaha perikanan	kurangnya informasi ttg sesama pelaku usaha	C	menurunnya produksi dan omzet pemasaran hasil perikanan	sosialisasi dan menyebarkan informasi usaha perikanan di medsos	3	2	6	sangat rendah	menghidupkan cluster perikanan	Dispeterikan/cq Bid. Budidaya Perikanan

11.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Meningkatkan kemampuan peternak dalam hal budidaya dan agribisnis peternakan, serta meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan peternak	(1) penentuan kelompok penerima bantuan (2) Faktor alam (3) terhambatnya proses pengadaan	(1) kurang kompak/kurang solid (2) perubahan musim, resiko penyakit (3) gagal lelang	C	(1) terhambatnya pemeliharaan sarana prasarana (2) terhambatnya proses pengadaan BJJ, (3) kematian ternak	(1) pertemuan rutin kelompok, (2) pembinaan/pendampingan kelompok	2	2	4	rendah	Sinkronisasi perencanaan (RAB, RKA, DPA) dan pelaksanaan kegiatan antara kelompok dengan Dinas. Lebih teliti dalam verifikasi kelompok penerima bantuan	Dispetikan/cq Bid. Peternakan					
12.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
	Penyediaan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Meningkatkan kemampuan peternak dalam hal budidaya dan agribisnis peternakan, serta meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan peternak	(1) penentuan kelompok penerima bantuan (2) Faktor alam (3) terhambatnya proses pengadaan	(1) kurang kompak/kurang solid (2) perubahan musim, resiko penyakit (3) gagal lelang	C	(1) terhambatnya pemeliharaan sarana prasarana (2) terhambatnya proses pengadaan BJJ, (3) kematian ternak	(1) pertemuan rutin kelompok, (2) pembinaan/pendampingan kelompok	2	2	4	rendah	Sinkronisasi perencanaan (RAB, RKA, DPA) dan pelaksanaan kegiatan antara kelompok dengan Dinas	Dispetikan/cq Bid. Peternakan					
13.	Pembangunan Prasarana Pertanian																	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	tercukupinya kebutuhan air untuk usaha peternakan (pianisasi mendukung peternakan) (bantuan berupa uang)	(1) dinamika kelompok/kelembagaan, (2) ketidaksesuaian antara ajuan anggaran di proposal dan realisasi (3) Force majeure	(1) kurang kompak/kurang solid (2) fluktuasi harga (3) lokasi dan jarak sumber air		kebutuhan air utk kelompok tdk terpenuhi	(1) pertemuan rutin kelompok, (2) pembinaan/pendampingan kelompok	2	2	4	rendah	Sinkronisasi perencanaan (RAB, RKA, DPA) dan pelaksanaan kegiatan antara kelompok dengan Dinas	Dispetikan/cq Bid. Peternakan					
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	tercukupinya kebutuhan air untuk usaha peternakan (pianisasi mendukung peternakan) (bantuan berupa uang)	(1) dinamika kelompok/kelembagaan, (2) ketidaksesuaian antara ajuan anggaran di proposal dan realisasi (3) Force majeure	(1) kurang kompak/kurang solid (2) fluktuasi harga (3) lokasi dan jarak sumber		kebutuhan air utk kelompok tdk terpenuhi	(1) pertemuan rutin kelompok, (2) pembinaan/pendampingan kelompok	2	2	4	rendah	Sinkronisasi perencanaan (RAB, RKA, DPA) dan pelaksanaan kegiatan antara kelompok dengan Dinas	Dispetikan/cq Bid. Peternakan					
14.	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota																	
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah aksesor yang mendapat pelayanan inseminasi (5000 ekor sapi)	populasi sapi, kambing tdk meningkat	kurangnya pengetahuan peternak tlg IB	C	target populasi dan perbaikan genetik ternak tidak tercapai	sosialisasi dan pendampingan ke peternak, pemberian vitamin dan hormon kpd sapi, melakukan uji lab	2	4	8	rendah	memutakhirkan database populasi ternak	Dispetikan/cq UPT BBT					
15.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota																	

	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian kasus penyakit hewan menular dan jumlah lokasi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular / zoonosis	Mengantisipasi terjadinya penyakit hewan secara keseluruhan dan penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya		C	Bila seseorang terjangkit penyakit yang disebabkan oleh Bakteri, Virus, Parasit yang bisa menular dari hewan atau sebaliknya, maka orang	vaksinasi berkala, pemberian pakan hewan dan vitamin yang bagus	2	2	4	rendah		Dispetenkan/cq Bid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	
16.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota													
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Pengendalian kasus penyakit hewan menular	apabila kegiatan ini tidak terlaksana, penyakit yang dapat tidak terdeteksi sejak awal dan dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas sehingga semakin sulit pengendaliannya	keterbatasan dana dan prasarana, kurangnya perhatian dan	UC / C	penyebaran penyakit hewan (sapi, kambing domba, ayam itik, kucing anjing) dan ikan yang meluas dan penambahan kasus baru	pemberian vitamin, pengujian untuk deteksi dini penyakit, pengujian kualitas pakan dan kualitas air serta sosialisasi dengan	3	3	9	moderat	membuat jadwal monitoring dan surveilans secara berkala, sehingga dapat menyampaikan kewaspadaan dini terhadap penyakit ikan (dengan pengambilan sampel serologi maupun	Dispetenkan / cq UPT BKT I	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengendalian kasus penyakit hewan menular	apabila kegiatan ini tidak terlaksana, penyakit yang dapat tidak terdeteksi sejak awal dan dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas sehingga semakin sulit pengendaliannya	keterbatasan dana dan prasarana, kurangnya perhatian dan atensi dari pemangku	UC / C	penyebaran penyakit hewan (sapi, kambing domba, ayam itik, kucing anjing) dan ikan yang meluas dan penambahan kasus baru sehingga pelaku usaha mengalami kerugian materi yang besar	pemberian vitamin, pengujian untuk deteksi dini penyakit, pengujian kualitas pakan dan kualitas air serta sosialisasi dengan leaflet tentang anjuran kewaspadaan dini terhadap	3	3	9	moderat	membuat jadwal monitoring dan surveilans secara berkala, sehingga dapat menyampaikan kewaspadaan dini terhadap penyakit ikan (dengan pengambilan sampel serologi maupun identifikasi parasit	Dispetenkan / cq UPT BKT I	
17.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner													
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Untuk membentakkan rasa aman kepada masyarakat khususnya di Kab. Magelang dalam mengkonsumsi Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH (Aman Sehat	Mengantisipasi terjadinya penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya		C	Bila seseorang terjangkit penyakit yang disebabkan oleh Bakteri, Virus, Parasit yang bisa menular dari hewan atau sebaliknya, maka orang	pembinaan masyarakat, vaksinasi berkala, pemberian pakan hewan dan vitamin yang bagus, pembinaan, pembinaan	2	2	4	rendah		Dispetenkan/cq Bid. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian kasus penyakit hewan menular dan jumlah lokasi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular / zoonosis	Mengantisipasi terjadinya penyakit hewan secara keseluruhan dan penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya		C	Bila seseorang terjangkit penyakit yang disebabkan oleh Bakteri, Virus, Parasit yang bisa menular dari hewan atau sebaliknya, maka orang	vaksinasi berkala, pemberian pakan hewan dan vitamin yang bagus	2	2	4	rendah		Dispetenkan/cq Bid. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	
18.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan													
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Untuk membentakkan rasa aman kepada masyarakat khususnya di Kab. Magelang dalam mengkonsumsi Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH (Aman Sehat	Mengantisipasi terjadinya penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya		C	Bila seseorang terjangkit penyakit yang disebabkan oleh Bakteri, Virus, Parasit yang bisa menular dari hewan atau sebaliknya, maka orang	pembinaan masyarakat, vaksinasi berkala, pemberian pakan hewan dan vitamin yang bagus, pembinaan, pembinaan	2	2	4	rendah		Dispetenkan/cq Bid. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	rendah
19.	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Potong Hewan													
	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Potong Hewan	Pengendalian kasus penyakit hewan menular	apabila kegiatan ini tidak terlaksana, penyakit yang dapat tidak terdeteksi sejak awal dan dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas sehingga semakin sulit pengendaliannya	keterbatasan dana dan prasarana, kurangnya perhatian dan atensi dari pemangku kesehatan	UC / C	penyebaran penyakit hewan (sapi, kambing domba, ayam itik, kucing anjing) dan ikan yang meluas dan penambahan kasus baru sehingga pelaku usaha mengalami kerugian materi yang besar	pemberian vitamin, pengujian untuk deteksi dini penyakit, pengujian kualitas pakan dan kualitas air serta sosialisasi dengan leaflet tentang anjuran kewaspadaan dini terkait musim / predisposisi	3	3	9	moderat	membuat jadwal monitoring dan surveilans secara berkala, sehingga dapat menyampaikan kewaspadaan dini terhadap penyakit ikan (dengan pengambilan sampel serologi maupun identifikasi parasit	Dispetenkan / cq UPT BKT I	
20	Izin Usaha Pengecer (Toko Ritel/ Sub Distributor) Obat Hewan	Untuk membentakkan rasa aman kepada masyarakat khususnya di Kab. Magelang dalam mengkonsumsi Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH (Aman Sehat, Utuh dan Halal)	Mengantisipasi terjadinya penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya		C	Bila seseorang terjangkit penyakit yang disebabkan oleh Bakteri, Virus, Parasit yang bisa menular dari hewan atau sebaliknya, maka orang tsb akan terjangkit dan orang atau sebaliknya	pembinaan masyarakat, vaksinasi berkala, pemberian pakan hewan dan vitamin yang bagus, pembinaan, pembinaan pedagang daging dan Pangan Asal Hewan (telur, susu)	2	2	4	rendah		Dispetenkan/cq Bid. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	

Identifikasi Tujuan Kegiatan	HASIL IDENTIFIKASI RISIKO (Dari kegiatan identifikasi dihasilkan daftar risiko, penyebab, serta dampaknya) perka 24/2013 hal 22 (kolom 5,6,8)	HASIL ANALISIS RISIKO (Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu risiko dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu Informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya perka 24/2013 hal 24 (kolom 10,11,12)	PRIORITAS RISIKO (perka 24/2013 hal 24)	Respon risiko adalah segala sesuatu yang akan dilakukan oleh organisasi terkait dengan risiko yang telah dinilai. Respon risiko akan membantu unit organisasi dalam menetapkan kegiatan pengendalian apa yang akan dilakukan dalam rangka penanganan risiko. (perka 24/2013 hal 26)		
			status risiko menunjukkan prioritas risiko yang akan ditangani	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO		

Keterangan:

- Nama SKPD diisi dengan nama SKPD masing-masing
 - Tujuan diisi sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Renstra. Jika memiliki lebih dari 1 (satu) tujuan maka membuat register risiko dan rencana pengendalian sesuai dengan jumlah tujuan yang ada.
- (1) Diisi dengan nomor urut;
 - (2) Diisi dengan nama kegiatan utama sesuai pengelompokan dalam pencapaian tujuan (sesuai matrik Rencana Strategik)
 - (3) Diisi dengan tujuan kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja sasaran;
 - (4) Untuk no diisi dengan kode/nomor risiko;
 - (5) Diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi berdampak terhadap pencapaian tujuan.
 - (6) Diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut.
 - (7) Diisi kategori penyebab, apakah uncontrollable (UC) atau Controllable (C) bagi unit kerja
 - (8) Diisi dengan uraian dampak jika risiko ko'om (5) terjadi;
 - (9) Diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
 - (10) Diisi dengan tingkat probabilitas/kemungkinan (K), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 5;
 - (11) Diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 5;
 - (12) Diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas/kemungkinan terjadi (K) dan dampak (D);
 - (13) Diisi dengan peringkat risiko, apakah rendah, sedang, moderat, tinggi atau ekstrim;
 - (14) Diisi dengan rencana pengendalian risiko/pengembangan infrastruktur pengendalian (misal kebijakan/SOP/aturan lainnya);
 - (15) Diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko)
 - (16) Diisi dengan jadwal waktu pengembangan infrastruktur pengendalian (misal kebijakan/SOP/aturan lainnya).

Mungkid, Mei 2021
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

JONI INDARTO, AP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741204 199311 110